**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **LATAR BELAKANG**

Dalam undang-undang No 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 Pasal 1 Ayat 2 tentang perbankan menyatakan bahwa Bank adalah salah satu badan usaha finansial yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Penyaluran dalam bentuk kredit akan memberikan kontribusi pendapatan bunga bagi bank. Kontribusi pendapatan bunga kredit di Indonesia masih mendominasi pendapatan bank dibanding dari *fee base income*. Hal ini dapat diartikan bahwa aktivitas perkreditan sangat besar dalam perbankan.

Untuk mengatasi kemiskinan yang ada di Indonesia pemerintah membuat suatu program yakni Kredit Usaha Rakyat atau yang dikenal secara umum sebagai KUR, untuk membantu pelaku Usaha Mikro kecil Menengah (UMKM) dan koperasi dalam permodalan, membuka lowongan pekerjaan baru dan untuk meningkatkan perekonomian pada masyarakat.

Tepatnya pada tanggal 9 maret 2007, telah dikeluarkan keputusan dari sidang kabinet yang berisi tentang peningkatan pengembangan UMKM dan koperasi yang telah didorong oleh pemerintah melalui peningkatan dari kapasitas perusahaan penjamin untuk meningkatkan akses dari koperasi dan UMKM terhadap kredit atau pembiayaan yang berasal dari perbankan, pada tanggal 9 Oktober 2007 juga telah diadakan suatu penandatanganan resmi tentang perihal kesepakatan yaitu MOU atau nota kesepahaman bersama antara pemerintah dengan pihak perbankan mengenai penjaminan kredit terhadap UMKM dan koperasi.

Keputusan tersebut sudah memberikan lampu hijau bagi para koperasi dan UMKM yang sedang membutuhkan pembiayaan dan mengalami hambatan atau kendala karena kekurangan agunan, maka akan dapat diatasi dengan KUR yang telah dselanggarakan oleh pemerintah bekerjasama dengan pihak bank yang terdapat di Indonesia.

Tanggal 5 November 2007, Presiden RI telah meluncurkan KUR untuk menbantu para usaha mikro, kecil menengah dan koperasi dalam mendapatkan modal berupa kredit pembiayaan yang berasal dari perbankan. Meskipun demikian harus diingat bahwa KUR meski tidak memiliki agunan bukan berarti tidak ada resiko yang ditimbulkan.

KUR resminya ditetapkan pada keputusan presiden No. 19 tahun 2015 sebagai revisi keputusan presiden No. 14 tahun 2015 tentang komite kebijakan pembiayaan bagi usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Tidak ada keputusan pemberian kredit tanpa risiko, tidak akan ada bank yang mampu mengembangkan bisnisnya jika terus menghindari risiko. Maka dalam pemberian kredit harus ada sistem pengendalian intern.

Kegiatan pengendalian intern adalah suatu tindakan yang dibutuhkan untuk mengatasi risiko. Pada kegiatan ini antara lain menetapkan pelaksanaan prosedur kebijakan yang sudah dibuat serta memastikan apakah tindakan untuk mengatasi risiko sudah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Tentunya sistem pengendalian ini akan dibandingkan dengan sistem pengendalian intern menurut COSO.

COSO (*Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commision*) adalah sector swasta yang dibentuk pada tahun 1985. Selama ini COSO telah menyusun suatu definisi umum pengendalian, standar, dan kriteria internal yang dapat digunakan perusahaan untuk menilai sistem pengendalian intern pada perusahaan.

Dari hasil laporan yang diperoleh melalui wawancara dengan kepala BRI unit Wanea dapat disimpulkan bahwa setiap tahun realisasi KUR Mikro meningkat ini dikuatkan dengan posisi *outstanding* (kredit lancar, *Non Performing Loan,* kredit dalam pengawasan khusus) dan KUR Mikro macet mecapai jumlah Rp. 7.100.760.997,- dan jumlah nasabah KUR Mikro mencapai 481 nasabah lancar dan 145 nasabah macet, dengan rata-rata realisasi KUR Mikro sebesar Rp. 11.343.068,7,- data merupakan akumulasi dari tahun 2007 sampai dengan posisi bulan April 2017. Ini berarti dapat dikatakan bahwa perkembangan penyaluran KUR Mikro cukup diminati oleh pelaku usaha. Dengan jumlah *outstanding* dan KUR Mikro macet yang ada, tidak menutup kemungkinan bisa terjadi penyimpangan dalam lingkup internal seperti tindakan yang dilakukan karyawan untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan perusahan dan debitur KUR maka, pengendalian intern yang ada pada BRI unit Wanea perlu dibandingkan dengan pengendalian intern menurut COSO guna melihat pengendalian intern yang ada sudah efektif dan efisien bagi perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik menyusun laporan akhir dengan judul “Laporan Akhir Sistem Pengendalian Intern Kredit Usaha Rakyat Mikro pada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (PERSERO) Unit Wanea”

* 1. **RUMUSAN MASALAH**

Permasalahan dalam laporan akhir ini praktek ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah sistem pengendalian intern KUR Mikro yang ada pada BRI Unit Wanea sudah efektif dan efisien ?

1. Bagaimana penerapan sistem pengendalian COSO pada KUR Mikro BRI unit Wanea ?
	1. **TUJUAN PENELITIAN**
2. Untuk mengetahui sistem pengendalian intern KUR Mikro yang ada pada BRI wanea sudah efektif dan efisien atau belum.
3. Untuk mengetahui penerapan sistem pengendalian intern COSO pada BRI wanea.
	1. **MANFAAT PENELITIAN**
4. Bagi PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Unit Wanea

Laporan Akhir Praktek ini diharapkan dapat menjadi bahan pembanding PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Unit Wanea untuk mengolah sistem pengendalian intern lebih baik.

1. Bagi Politeknik Negeri Manado

Laporan Akhir Prakterk ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam pengembangan kurikulum.

1. Bagi Penulis

Laporan Akhir Prakterk ini sangat membantu dalam mengembangkan pengetahuan penulis dalam menerapkan segala ilmu yang penulis dapat selama proses belajar di Politeknik Negeri Manado yang penulis tuangkan kedalam praktik kerja lapangan dan laporan akhir praktek tentang sistem pengendalian intern kredit usaha rakyat pada bank.

* 1. **METODE ANALISIS DATA**

Metode analisis yang digunakan penulis adalah metode deskriptif komperatif yaitu menggambarkan, menguraikan, menjelaskan sistem pengendalian intern KUR Mikro pada BRI unit Wanea membandingkan dengan sistem pengendalian intern COSO.

* 1. **DESKRIPSI UMUM PT BRI (PERSERO) Tbk. Unit Wanea**
1. **Sejarah Singkat Perusahaan**

Bank Rakyat Indonesia merupakan bank perkreditan rakyat pertama dan juga merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia yang pada awalnya didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Aria Wirjaatmadja dengan nama *“HULP EN SPAARBANK DER INLANDSCHE BESTUURS AMBTENAREN”* (Bank Bantuan dan Simpanan Milik Pegawai Pangreh Praja Berkebangsaan Pribumi). Bank Rakyat Indonesia berdiri pada tanggal 16 Desember 1895 dengan akta otentik dibuat oleh E. Sienburgh Asisten Residen.

Dengan peraturan pemerintah No. 1 tahun 1946 pasal 1 disebutkan bahwa Bank BRI adalah Bank Pemerintah di Republik Indonesia. Adanya situasi perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948 kegiatan bank BRI sempat terhenti untuk sementara waktu dan baru aktif kembali setelah perjanjian Renville pada tahun 1949 dan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. Pada waktu itu berdasarkan PERPU No.41 tahun 1960 dibentuk Bank Koperasi Tani dan nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan dari BRI, Bank Tani Nelayan dan *Nederlandsche Maatschappij* (NHM). Kemudian berdasarkan penetapan Presiden No. 9 tahun 1965 BKTN diintergrasikan kedalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan.kemudian keluar Penpres No. 17 tahun 1965 tentang pembentukan Bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia dalam ketentuan baru itu, Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan diintegrasikan dengan nama Bank Negara Unit II bidang Ekspor Impor (RURAL/EXIM).

Berdasarkan UU No. 14 tahun 1967 tentang UU pokok perbankan dan UU No. 13 tahun 1968 tentang UU Bank Sentral yang intinya mengembalikaan fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rular dan Ekspor Impor dipisahkan masing-masing menjadi dua Bank yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia. Kemudian, berdasarkan UU No.21 tahun 1968 menetapkan kembali tugas pokok BRI sebagai Bank Umum.

Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan UU perbankan No. 7 tahun 1992 dan peraturan pemerintah RI No. 21 tahun 1992 status BRI berubah menjadi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dimana peralihan bentuk hukum menjadi PERSERO tidak merubah statusnya sebagai Badan Usaha Milik Negara. Pelaksanaan pendirian PERSERO tersebut dilaksanakan dengan akte notaris No. 133 pada tanggal 31 juli 1992 yang dibuat oleh dan dihadapkan dengan Muhani Salin, SH notaris di Jakarta.

Seiring dengan perkembangan dunia perbankan yang semakin pesat maka sampai saat ini BRI melayani seluruh nasabah melalui 9.808 unit kerja termasuk unit Wanea dan jaringan e-channel yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia. BRI mengoperasikan 7 jenjang kantor pelayanan, terdiri dari kantor pusat, 18 kantor wilayah, 453 kantor cabang (termasuk 3 unit kerja luar negeri), 565 kantor cabang pembantu, 950 kantor kas, 5.144 BRI unit, 2.212 Teras BRI, dan 465 Teras BRI Keliling. BRI unit Wanea berdiri pada bulan Oktober 2006.

1. **Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas**
2. **Struktur Organisasi**

Struktur organisasi dapat diartikan sebagai kerangka kerja formal organisasi yang dengan kerangka kerja itu tugas-tugas pekerjaan dibagi-bagi,dikelompokan, dan dikoordinasikan (Robbins dan Coulter,2007:284).

Dengan demikian adanya pemisahan tugas dan wewenang secara jelas sehingga masing-masing karyawan dapat menyelesaikan tugasnya secara efektif dan efisien.

Struktur organisasi di PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk unit Wanea sangat sederhana adalah sebagai berikut :

1. Unsur Pimpinan, yaitu Kepala Unit (Ka-Unit) yang membawahi petugas pelaksana
2. Petugas Pelaksana, terdiri dari :
3. Asisten Mantri KUR
4. Teller
5. Customer Service-KUR

Struktur organisasi PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk unit Wanea dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

*Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Perusahaan*

**Kepala Unit**

 **(Ka-Unit)**

**Asisten Mantri KUR**

**Deskman**

**Teller**

**Customer Service KUR Mikro**

1. **Deskripsi Tugas**

Sesuai dengan struktur organisasi yang telah digambarkan diatas maka pembagian tugas dan tanggung jawab setiap jabatan pada PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk unit Wanea adalah sebagai berikut :

1) Kepala Unit

Kepala Unit mengemban tugas sebagai berikut :

1. Memutuskan permintaan pinjaman fiat bayar pinjaman atau simpanan, menandatangani surat-surat sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
2. Memutuskan permohonan KUR oleh calon debitur ditolak atau diterima.
3. Melakukan pembinaan kepada nasabah simpanan maupun pinjaman.
4. Memberikan otorisasi pada surat pengakuan hutang dan kwitansi pinjaman.
5. Menyampaikan laporan dan informasi kepada AMBM (*Asisten Manager Branch Mikro)* apabila terjadi penyimpangan dalam penerimaan simpanan dan pinjaman.

2) Assistant Account Officer People Business Program (Asisten Mantri KUR)

Sebagai upaya pencapaian target penyaluran KUR Mikro, ada tenaga pemasar yang disebut Asisten Mantri KUR Mikro, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Merencanakan dan melaksanakan aktivitas penjualan produk KUR Mikro kepada calon debitur dalam rangka mencapai target jumlah debitur yang ditetapkan.
2. Merencanakan dan melaksanakan aktifitas penjualan produk KUR Mikro sesuai kewenangannya, untuk menunjang pencapaian target penjualan KUR Mikro yang ditetapkan.

c. Menyiapkan aplikasi pinjaman, memeriksa kelengkapan dan masa berlaku dokumen pinjaman dari calon debitur sesuai kewenangannya, untuk mendukung analisis pemberian KUR Mikro.

d. Membina hubungan baik dengan calon debitur KUR Mikro, untuk memastikan pinjaman yang diberikan sesuai peruntukannya dan memastikan kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya.

e. Melaksanakan aktifitas penagihan (collecting) secara efektif dan efisien terhadap debitur KUR Mikro yang bermasalah atau yang memiliki indikasi akan bermasalah, berkoordinasi dengan jajaran Relationship Management (RM) sesuai kewenangannya untuk mengendalikan timbulnya resiko kredit dengan tetap menjaga hubungan baik dengan debitur dan menjaga citra BRI guna mengendalikan angka Non Performing Loan (NPL) KUR Mikro dalam ukuran yang ditetapkan.

f. Menyusun laporan-laporan sesuai kewenangannya agar memenuhi ketentuan yang berlaku dan kebutuhan Unit kerja lain/instansi terkait.

g. Melaksanakan kerja sama dan membina hubungan baik dengan nasabah, Unit Kerja lain, lembaga/instansi lain atau pihak ketiga terkait lainnya untuk memperlancar proses pemberian fasilitas KUR Mikro, pencapaian target yang ditetapkan dan peningkatan kinerja sesuai kewenangannya.

h. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya dari atasan sesuai peran dan kompetensinya dalam mencapai target/standar yang ditetapkan secara efektif dan efisien, sepanjang tugas pokok sudah diselesaikan.

3) Teller

Tugas Teller yang bersangkutan dengan KUR adalah :

1. Memberi Cap pada kwitansi pinjaman
2. Menyiapkan uang sejumlah kredit yang cair.
3. Menjurnal dan memposting kwitansi pinjaman secara komputerisasi.

4) Customer Service-KUR

Customer Service KUR adalah tenaga administrasi yang khusus dipekerjakan untuk urusan KUR-Mikro, tugas-tugasnya adalah sebagai berikut:

a. Mengumpulkan, menyediakan dan mengolah data-data internal dan eksternal terkait KUR Mikro, serta mengidentifikasi dan menguraikan masalah untuk menyajikan data, informasi atau laporan yang diperlukan dalam rangka mencapai kinerja

b. Mengimplementasikan kebijakan/pedoman/ketentuan dibidang administrasi KUR Mikro dan ketentuan pelaksanaannya untuk menyelesaikan operasional administrasi KUR Mikro sesuai bidang tugasnya

c. Melaksanakan pemeriksaan dan registrasi atau permohonan KUR Mikro untuk memastikan kelengkapan, keamanan dan keabsahan dokumentasi kredit dan tertib administrasinya sesuai ketentuan yang berlaku

d. Menyiapkan dokumen-dokumen dan nota-nota/dokumen pembukuan kredit untuk mendukung proses penyelesaian operasional administrasi KUR Mikro di BRI unit Wanea

e. Mengelola berkas pinjaman KUR Mikro untuk memastikan kelengkapan, keabsahan, keamanan dan tertib administrasinya

f. Mengagenda dan mendokumentasikan surat atau dokumen keluar masuk sesuai bidang tugasnya untuk memastikan surat atau dokumentasi didistribusikan atau diarsipkan sesuai ketentuan yang berlaku dan kepentingannya

g. Membuat draft surat/dokumen/laporan dengan analisis sederhana dan supervisi atasannya untuk menyajikan kepada atasannya secara akurat dan tepat waktu sesuai kepentingan yang berlaku dan kepentingannya

h. Menyediakan data atau informasi yang dibutuhkan dalam rangka melaksanakan tindak lanjut audit sesuai dengan bidang tugasnya untuk memastikan tindak lanjut perbaikan dilaksanakan sebagai tanggapan positif atas temuan audit

i. Membina hubungan dan kerja sama yang baik dengan pihak-pihak terkait baik internal maupun eksternal dengan supervisi atasannya untuk memperlancar penyelesaian tugas

j. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan dari atasan sesuai dengan peran dan kompetensinya untuk mencapai target/standar yang ditetapkan secara efektif dan efisien, sepanjang tugas pokok sudah diselesaikan

**c. Aktivitas Usaha BRI Unit Wanea**

BRI unit Wanea merupakan bank unit milik pemerintah yang melakukan usaha bank umum seperti bank pemerintah pada umumnya serta BRI memberikan jasa-jasa perbankan yang masih dalam lingkup dalam negeri yakni sebagai berikut :

1. Usaha Simpanan

Bank memberikan jasa yang sangat penting bagi kelancaran perekonomian dengan memberikan fasilitas untuk menghimpun tabungan masyarakat untuk tujuan ekonomi dan sosial (Herman Darmawi, 2014:4). Untuk menghimpun tabungan masyarakat BRI mengeluarkan beberapa produk sebagai berikut :

1. Giro BRI dalam rupiah
2. BRITAMA
3. Simpanan Pedesaan (SIMPEDES)
4. Simpanan Masyarakat Kota (SIMASKOT)
5. Deposito berjangka BRI (DEPOBRI)
6. Sertifikat deposito BRI (SERTIBRI)
7. Usaha Pinjaman/Kredit

Fungsi utama bank umum adalah pemberian kredit kepada para peminjam. Dalam pemberian kredit, bank umum memberikan pelayanan sosial yang besar,karena melalui kegiatannya produksi dapat ditingkatkan. Investasi barang modal dapat diperluas dan pada akhirnya standar hidup yang lebih tinggi dapat dicapai. Jenis-jenis kredit yang diberikan sebagi berikut :

1. Kredit pengadaan pangan / pupuk/ cengkeh
2. Koperasi
3. Kretab/ Kresun
4. Kredit kecil investasi (KKI)/ Kredit modal kerja (KKMK)
5. Pembinaan peningakatan pendapatan petani/ nelayan kecil (P4K)
6. Kredit modal kerja ekspor (KMKE)/ Kredit modal kerja impor (KMKI)
7. Kredit kepemilikan rumah (KPR)
8. Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro

KUR Mikro merupakan program pemerintah guna membantu para pelaku UMKM dan Koperasi untuk mengembangkan usaha yang diharapkan dapat terus berkelanjutan. KUR Mikro yang ada pada BRI unit Wanea mencapai 626 nasabah dan jumlah *outstanding* serta KUR Mikro macet sebesar Rp. 7.100.760.997,- dengan rata-rata realisasi KUR Mikro sebesar Rp. 11.343.068,7,-

1. Kredit kendaraan bermotor (KKB)
2. Jasa lalu lintas Pembayaran
3. Menciptakan Uang Giral
4. Menyediakan jasa Wali-Amanat
5. Penerbitan Surat Garansi Bank
6. Jasa Inkaso
7. Jasa Bank Lainnya